

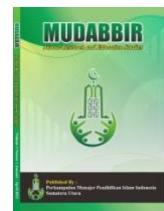


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Konflik Sosial Berbasis Agama: Penyebab, Dinamika, dan Solusinya

Afrina Al Mufida¹, Erni Juliani², Mirza Syadat Rambe³,

Neneng Ariska⁴, Nur Azizah Siregar⁵, Uci⁶

^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli, Tebing Tinggi, Indonesia

afrinaal280@gmail.com, ernijuliani2907@gmail.com, m.srambe87@gmail.com,
nenengariska2021@gmail.com, nurazizahsiregar923@gmail.com, ucintsy@gmail.com

ABSTRAK

Konflik sosial berbasis agama merupakan fenomena kompleks yang tidak semata-mata berakar pada perbedaan teologis, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor internal keagamaan, faktor eksternal politik-ekonomi, dan faktor historis-kultural. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penyebab, dinamika, dan solusi konflik tersebut dengan menggunakan sintesis empat perspektif teoritis sosiologi agama: Teori Fungsionalisme, Teori Konflik, Interaksionalisme Simbolik, dan Teori Identitas Sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur sistematis dan analisis kasus, dengan fokus pada konteks Indonesia dan contoh komparatif lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik muncul dari eksklusivisme teologis dan konstruksi makna simbolik yang antagonis (faktor internal), instrumentalisasi identitas agama untuk kepentingan politik dan persaingan sumber daya (faktor eksternal), serta memori kolektif dan pola relasi historis yang timpang (faktor historis-kultural). Konflik termanifestasi dalam spektrum mulai dari ketegangan kognitif-simbolik hingga kekerasan kolektif langsung, dengan dinamika yang dipicu oleh polarisasi identitas dan diperparah oleh mobilisasi politik. Dampaknya bersifat multidimensi, merusak kohesi sosial, menimbulkan trauma psikologis, mendistorsi politik, dan melemahkan perekonomian. Oleh karena itu, solusi yang efektif memerlukan pendekatan holistik dan multi-level, meliputi penegakan hukum yang konsisten dan kebijakan inklusif oleh negara, pemberdayaan dialog dan ekonomi bersama di tingkat masyarakat sipil, serta rekonstruksi narasi agama yang damai dan upaya rekonsiliasi kultural. Rekomendasi penelitian diarahkan kepada pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk membangun infrastruktur perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: Konflik Agama, Sosiologi Agama, Instrumentalisasi, Identitas Sosial, Resolusi Konflik, Indonesia.

PENDAHULUAN

Agama memainkan peran paradoksal dalam masyarakat di satu sisi menjadi sumber inspirasi bagi perdamaian dan kohesi sosial, di sisi lain sering kali menjadi faktor pembelah yang memicu konflik berkepanjangan. Konflik sosial berbasis agama, baik dalam bentuk kekerasan langsung, diskriminasi struktural, maupun ketegangan tersembunyi, tetap menjadi tantangan global dan nasional, termasuk di Indonesia yang multikultural. Fenomena ini tidak dapat direduksi sekadar menjadi benturan doktrin teologis semata, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara dimensi keagamaan dengan variabel politik, ekonomi, dan dinamika kekuasaan. Misalnya, ketegangan antar-kelompok beragama kerap memuncak pada momen kompetisi sumber daya atau kontestasi politik, di mana identitas keagamaan dimobilisasi untuk meraih dukungan massa. Oleh karena itu, pembahasan ini penting tidak hanya untuk kepentingan akademis dalam memahami mekanisme konflik kontemporer, tetapi juga untuk merancang kebijakan dan intervensi sosial yang efektif guna membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.

Untuk menganalisis kompleksitas konflik agama, penelitian ini didukung oleh sejumlah teori kunci. Teori Konflik (Marx, Weber, Coser) membantu menelusuri akar struktural, baik sebagai perjuangan atas sumber daya material (Marxian), kompetisi status dan definisi kebenaran (Weberian), maupun fungsi konflik dalam memperkuat solidaritas kelompok (Coser). Teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner) menjelaskan dinamika psikologis di balik pembentukan "in-group" dan "out-group", di mana ancaman terhadap identitas keagamaan dapat memperdalam prasangka dan diskriminasi (Ariyanto, 2023). Sementara itu, pendekatan Instrumentalisasi Agama menyingkap bagaimana simbol dan sentimen keagamaan sering kali dimanfaatkan oleh elite politik atau ekonomi sebagai alat mobilisasi untuk mencapai tujuan kekuasaan, sehingga konflik yang tampaknya bernuansa agama sebenarnya bermotifkan kepentingan dunia. Di sisi solusi, Teori Kontak (Allport) menawarkan landasan untuk mengurangi prasangka melalui interaksi yang setara dan terstruktur, sedangkan konsep demokrasi konsosiasi (Lijphart) dan "twin tolerations" (Stepan) memberikan kerangka kelembagaan untuk mengelola keberagaman dalam negara demokratis (Hoffmann et al., 2024).

Dengan memadukan perspektif teoretis ini, jurnal ini bertujuan membedah secara komprehensif penyebab, dinamika, dan solusi konflik sosial berbasis agama. Analisis tidak hanya berfokus pada gejala permukaan, tetapi juga pada faktor pendorong struktural, politik, dan psikologis yang saling beririsan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang mendalam serta rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, aktivis perdamaian, dan pemimpin masyarakat dalam merancang strategi transformasi konflik dan memperkuat koeksistensi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis (*systematic literature review*) dan analisis kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena konflik sosial berbasis agama yang bersifat kompleks, multiinterpretasi, dan sarat makna, guna mencapai pemahaman konseptual dan kontekstual yang komprehensif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari (1) dokumen akademis seperti jurnal ilmiah, buku, dan disertasi yang membahas teori sosiologi agama dan studi konflik, serta (2) dokumen kasus berupa laporan penelitian lembaga riset, dokumen kebijakan, dan laporan tahunan lembaga HAM yang mendokumentasikan dinamika konflik berbasis agama, dengan fokus utama pada konteks Indonesia dan contoh komparatif lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka sistematis. Proses ini diawali dengan perumusan kriteria inklusi-eksklusi berdasarkan relevansi, keluasan waktu, dan kredibilitas akademis. Pencarian literatur dilakukan di berbagai database akademis menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan kelengkapan isi, sebelum data yang relevan seperti konsep teoretis, temuan empiris, dan pola konflik diekstraksi dan dikatalogisasi sesuai dengan tema penelitian.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*) dan analisis naratif, yang diarahkan oleh kerangka teoretis yang telah dibangun. Melalui analisis isi tematik, seluruh teks dibaca mendalam untuk mengidentifikasi, mengkodekan, dan mengelompokkan pola-pola terkait penyebab,

dinamika, dampak, dan solusi konflik. Analisis naratif digunakan untuk merekonstruksi kronologi dan proses dinamika konflik dalam studi kasus (Assingkily, 2021). Selanjutnya, temuan-temuan tersebut diinterpretasi dan disintesis melalui lensa teori-teori utama Fungsionalisme, Konflik, Interaksionalisme Simbolik, dan Identitas Sosial untuk menguji kesesuaian dan saling melengkapi antar-perspektif. Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan temuan dari berbagai dokumen guna meningkatkan validitas dan keandalan analisis.

Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berpusat pada penelusuran dan analisis dokumen elektronik dan fisik. Aspek etika penelitian dijaga melalui prinsip integritas akademik, yang diwujudkan dalam sitasi yang akurat untuk menghindari plagiarisme, objektivitas dalam menyajikan keberagaman perspektif, serta penyajian data kasus yang bertanggung jawab dengan fokus pada analisis pola dan bukan pada detail sensitif yang dapat memicu kembali luka. Melalui metode ini, diharapkan dapat dihasilkan sintesis pengetahuan yang kaya, mendalam, dan terstruktur secara teoretis.

LANDASAN TEORI SOSIOLOGI AGAMA

A. Teori Fungsionalisme

Berasal dari pemikiran Emile Durkheim, teori ini memandang agama sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk memelihara keteraturan dan integrasi masyarakat. Durkheim dalam *The Elementary Forms of Religious Life* berargumen bahwa agama bukan sekadar sistem kepercayaan kepada yang sakral, melainkan pemersatu kolektif yang merepresentasikan nilai-nilai bersama (*collective conscience*). Ritual dan simbol agama berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi anomie (keterasingan), dan memberikan makna serta stabilitas dalam kehidupan. Dalam konteks konflik, perspektif fungsionalis dapat menjelaskan mengapa agama menjadi sumber kohesi yang kuat bagi kelompok internal, namun juga dapat mengakibatkan disfungsi ketika solidaritas berlebihan dalam kelompok (in-group) berubah menjadi eksklusivisme dan prasangka terhadap kelompok luar (out-group). Konflik terjadi ketika fungsi integratif agama untuk satu kelompok berhadapan dengan klaim integratif kelompok lain, atau ketika nilai-nilai keagamaan tertentu dianggap tidak lagi selaras dengan perubahan sosial yang lebih luas (Huck, 2022).

B. Teori Konflik

Berakar pada pemikiran Karl Marx dan dikembangkan lebih lanjut oleh Max Weber, teori ini menekankan peran agama dalam mempertahankan atau menantang struktur ketimpangan dan kekuasaan. Bagi Marx, agama adalah "candu masyarakat" sebuah alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk melanggengkan dominasi dengan memberikan penghiburan ilusif bagi kaum tertindas dan mengalihkan perhatian dari eksplorasi material. Dari sudut pandang ini, konflik berbasis agama sering kali merupakan manifestasi terselubung dari konflik kelas atau perebutan sumber daya ekonomi. Sementara itu, Weber, dalam *The Sociology of Religion*, melihat agama tidak hanya sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai sumber motivasi untuk perubahan sosial (seperti etika Protestan yang memicu kapitalisme). Dalam analisis konflik kontemporer, teori ini yang diperkaya oleh para teoritis seperti Randall Collins menyoroti bagaimana agama dapat diinstrumentalisasi oleh elite politik atau ekonomi untuk memobilisasi massa, menguasai sumber daya, atau mendlegitimasi lawan. Konflik seolah-olah bersifat teologis, tetapi akar strukturnya terletak pada persaingan untuk kekuasaan, akses, dan pengakuan (Akhtar et al., 2022).

C. Teori Interaksionalisme Simbolik

Berfokus pada tingkat mikro-sosiologis, teori yang dipelopori oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer ini mengkaji bagaimana makna agama dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui interaksi sosial sehari-hari. Agama dipandang bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai realitas sosial yang terus-menerus diciptakan melalui interpretasi individu terhadap simbol, ritual, dan narasi keagamaan. Konsep kunci seperti "definisi situasi" (Thomas) dan "dramaturgi" (Goffman) membantu menjelaskan bagaimana identitas keagamaan dipentaskan dan dipersepsikan dalam interaksi.

Dalam konflik, perspektif ini mengungkap proses pelabelan (labelling), di mana suatu kelompok memberikan stigma tertentu kepada kelompok lain berdasarkan interpretasi terhadap simbol atau tindakan keagamaannya. Konflik dipicu dan dipelihara oleh siklus interpretasi yang bermusuhan, misalnya ketika sebuah tindakan

(seperti pembangunan rumah ibadah) diberi makna sebagai "ancaman" atau "dominasi" oleh kelompok lain melalui komunikasi dan propaganda. Dengan demikian, eskalasi konflik seringkali lebih terkait dengan perebutan makna simbolik daripada perbedaan doktrin yang sebenarnya (Irwandi, 2025).

D. Teori Identitas Sosial

Dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner dalam ranah psikologi sosial, teori ini secara khusus powerful untuk menganalisis dinamika kelompok dalam konflik agama. Teori ini berargumen bahwa individu memperoleh bagian dari identitas diri mereka dari keanggotaan dalam kelompok sosial (in-group). Proses kategorisasi sosial (membagi dunia menjadi "kita" vs "mereka"), identifikasi sosial (mengadopsi identitas kelompok), dan perbandingan sosial (membandingkan kelompok sendiri dengan kelompok lain secara positif) adalah mekanisme inti. Agama menyediakan sumber identitas sosial yang kuat, bermakna, dan seringkali eksklusif. Konflik berbasis agama, menurut teori ini, muncul ketika:

1. Identitas keagamaan merasa terancam, baik secara fisik, kultural, maupun status.
2. Terjadi kompetisi untuk mencapai atau mempertahankan distintivitas dan harga diri kelompok (positive distinctiveness).
3. Batasan antar-kelompok (group boundaries) diperkuat dan dipolarisasi, sehingga mengakibatkan favoritisme in-group dan prasangka terhadap out-group (Khadka, 2024).

Keempat perspektif ini tidak saling menafikan, melainkan saling melengkapi dan beroperasi pada tingkat analisis yang berbeda. Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik bekerja pada tingkat makro-struktural, menjelaskan peran agama dalam tatanan sosial atau pergulatan kekuasaan. Teori Interaksionalisme Simbolik beroperasi pada tingkat mikro-interaksional, mengurai konstruksi makna dalam pertemuan sehari-hari. Sementara Teori Identitas Sosial menjembatani tingkat mikro dan meso, dengan fokus pada psikologi kelompok.

Sebuah konflik agama yang lengkap dapat dianalisis dengan melihat: (1) bagaimana agama berfungsi mempersatukan sekaligus memisahkan kelompok (Fungsionalisme), (2) bagaimana konflik itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik-

ekonomi (Teori Konflik), (3) bagaimana stigma dan permusuhan dikonstruksi dalam interaksi sehari-hari (Interaksionalisme Simbolik), dan (4) bagaimana ancaman terhadap identitas kelompok memicu solidaritas sekaligus permusuhan (Teori Identitas Sosial). Dengan sintesis ini, analisis terhadap konflik sosial berbasis agama menjadi lebih komprehensif, multidimensi, dan mendalam.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Konflik Sosial Berbasis Agama

1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang inheren dalam sistem keagamaan dan komunitas pemeluknya, yang berpotensi memicu ketegangan. Perspektif Teori Fungsionalisme menunjukkan bahwa mekanisme pemeliharaan integrasi internal suatu kelompok agama, seperti penegasan batas yang tegas antara yang "suci" dan "profan" atau "iman" dan "kafir", dapat berubah menjadi sumber konflik ketika berhadapan dengan kelompok lain. Doktrin eksklusivisme teologis (klaim kebenaran mutlak dan jalan keselamatan yang tunggal) dan eskatologi (nubuat tentang pertarungan akhir zaman) dapat, dalam interpretasi tertentu, memandang kelompok di luar keyakinannya sebagai "liyan" yang perlu diwaspadai, dikonversi, atau bahkan dilawan.

Dari sudut pandang Interaksionalisme Simbolik, konflik juga lahir dari konstruksi makna simbolik yang antagonistik di tingkat komunitas. Ritual, pakaian, atau bentuk rumah ibadah suatu kelompok dapat diinterpretasikan oleh kelompok lain sebagai simbol dominasi, provokasi, atau penodaan terhadap simbol mereka sendiri. Proses "othering" (pengliyanan) ini diperkuat melalui khotbah, media internal, dan diskusi komunitas yang terus-menerus menegaskan perbedaan dan potensi ancaman (Wahid et al., 2025).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan elemen di luar ranah keagamaan murni yang memobilisasi, memanfaatkan, atau mempertajam perbedaan agama menjadi konflik terbuka. Di sinilah Teori Konflik memberikan penjelasan paling kuat. Agama sering diinstrumentalisasi menjadi alat oleh aktor-aktor politik dan ekonomi. Dalam kontestasi

kekuasaan, politik identitas digunakan untuk menggalang dukungan massa dengan cara membangkitkan sentimen keberpihakan kelompok dan ketakutan terhadap kelompok lain. Misalnya, isu pemimpin dari agama minoritas atau pembangunan rumah ibadah dapat dihembuskan untuk mempolarisasi elektoral. Demikian pula, persaingan memperebutkan sumber daya ekonomi yang langka (lahan, lapangan kerja, anggaran publik) dapat dicingkai dalam narasi agama untuk mengalihkan kemarahan dari ketimpangan struktural ke konflik identitas (Huda et al., 2024).

Teori Identitas Sosial melengkapi analisis ini dengan menunjukkan bahwa kondisi eksternal seperti marginalisasi ekonomi, diskriminasi kebijakan, atau ancaman terhadap status sosial suatu kelompok agama akan dirasakan sebagai ancaman terhadap identitas kolektif. Hal ini memicu respons defensif dan solidaritas kelompok yang tinggi, yang mudah disalurkan menjadi konflik jika ada provokasi atau mobilisasi dari elite (Basedau et al.,2023).

3. Faktor Historis-Kultural

Faktor ini berkaitan dengan memori kolektif dan pola relasi antar-kelompok yang terbentuk dalam lintasan sejarah panjang suatu masyarakat. Warisan konflik masa lalu seperti kerusuhan, perang saudara, atau periode penindasan bukan sekadar peristiwa yang berlalu, melainkan menjadi narasi sejarah yang hidup (*living history*) yang terus diturunkan dan dirawat dalam ingatan kolektif masing-masing kelompok. Narasi ini menciptakan prasangka dan ketidakpercayaan yang mengendap secara kultural. Pola hubungan mayoritas-minoritas yang timpang, di mana satu kelompok merasa berhak mendominasi ruang publik sementara kelompok lain merasa terus-terusan dipinggirkan, merupakan struktur konflik yang bersifat kultural. Teori Fungsionalisme dapat membaca fenomena ini sebagai "disfungsi" dari warisan kultural yang gagal beradaptasi dengan tuntutan masyarakat plural modern.

Sementara itu, Interaksionalisme Simbolik menjelaskan bagaimana peristiwa sejarah yang traumatis menjadi simbol bersama (master symbol) yang terus-menerus direproduksi dalam interaksi sosial, misalnya melalui cerita dari mulut ke mulut, peringatan-peringatan, atau literatur komunitas, sehingga menjaga luka lama tetap segar dan siap untuk dipicu kembali oleh insiden terkini. Teori Identitas Sosial menambahkan bahwa sejarah konflik menjadi bagian dari "kisah tentang diri kita"

(group narrative) yang mendefinisikan kelompok sebagai korban, pahlawan, atau penjaga tradisi, sehingga mempertajam batas identitas dan menyulitkan rekonsiliasi.

Ketiga klaster faktor ini tidak bekerja secara terpisah. Mereka saling berinteraksi dalam suatu dinamika yang kompleks. Faktor historis-kultural menyediakan ladang subur berupa prasangka dan memori kolektif. Faktor internal (seperti doktrin eksklusif) menyediakan bahasa dan kerangka legitimasi teologis. Sementara itu, faktor eksternal (kepentingan politik-ekonomi) bertindak sebagai pemicu (trigger) dan katalisator yang memobilisasi kedua faktor sebelumnya menjadi konflik aktual. Sebuah insiden kecil yang bersifat simbolis (faktor internal/interaksional) dapat meledak menjadi kerusuhan besar karena disentuh oleh provokasi politisi (faktor eksternal) dan membangkitkan luka sejarah yang belum sembuh (faktor historis-kultural). Dengan demikian, memahami konflik agama memerlukan analisis yang simultan terhadap ketiga lapisan penyebab ini dan cara mereka saling memperkuat dalam konteks sosial yang spesifik (Koos & Keulman, 2024).

B. Bentuk dan Dinamika Konflik

Konflik sosial berbasis agama tidak bersifat statis maupun monolitik. Ia memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk dan mengalami dinamika eskalasi serta de-eskalasi yang kompleks, yang dapat dipahami melalui sintesis teori-teori sosiologis.

1. Bentuk Konflik

Bentuk konflik dapat dikategorikan berdasarkan intensitas dan manifestasinya (Idrus, 2022):

- 1) Konflik Kognitif dan Simbolik: Bentuk paling dasar, berupa perbedaan keyakinan, prasangka, dan persaingan simbolik. Ini termanifestasi dalam wacana eksklusif, debat teologis yang memanas, hingga perang narasi di media dan ruang publik. Teori Interaksionalisme Simbolik sangat relevan di sini, di mana konflik terjadi pada tataran makna, seperti perebutan interpretasi atas simbol-simbol publik atau stigma terhadap praktik keagamaan tertentu.
- 2) Konflik Sosial-Teritorial: Berupa ketegangan dalam kehidupan bersama, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah, segregasi permukiman, atau pembatasan aktivitas keagamaan di ruang tertentu. Bentuk ini sering dipicu oleh

ancaman terhadap identitas (Teori Identitas Sosial) dan dikelola/dimanipulasi oleh kepentingan politik lokal (Teori Konflik).

- 3) Kekerasan Kolektif Langsung: Puncak manifestasi konflik, berupa kerusuhan, penyerangan, pembakaran tempat ibadah, atau pengusiran paksa. Bentuk ini biasanya melibatkan mobilisasi massa yang menggunakan identitas agama sebagai pemersatu (in-group solidarity - Teori Fungsionalisme & Identitas Sosial) dan sering dipicu oleh insiden simbolik yang telah diinterpretasikan sebagai ancaman serius, serta dimanfaatkan oleh aktor tertentu.

2. Dinamika Konflik

Dinamika konflik mengikuti pola yang dapat dijelaskan melalui interaksi berbagai mekanisme (Abu-Nimer,2022):

- 1) Eskalasi: Konflik mengalami eskalasi melalui proses polarisasi identitas. Menurut Teori Identitas Sosial, ancaman (nyata atau dibayangkan) menyebabkan kelompok menegaskan batas-batasnya, meningkatkan loyalitas internal, dan mendistorsi persepsi terhadap kelompok lain. Instrumentalisasi politik (Teori Konflik) mempercepat eskalasi dengan menyediakan organisasi, sumber daya, dan narasi permusuhan yang efektif. Sementara itu, spiral komunikasi yang bermusuhan (Interaksionalisme Simbolik) memastikan setiap tindakan dibaca dengan kecurigaan maksimal, menutup ruang untuk salah paham.
- 2) Pemeliharaan (Conflict Sustenance): Konflik dapat bertahan lama ketika berkembang menjadi siklus kekerasan balas dendam yang dibenarkan oleh narasi religio-historis. Memori kolektif tentang victimhood (Faktor Historis-Kultural) dirawat dan menjadi bagian dari identitas kelompok. Struktur ekonomi-politik yang timpang dan memberikan keuntungan kepada satu kelompok atas kelompok lain (Teori Konflik) juga memelihara status quo yang konfliktual.
- 3) De-eskalasi dan Transformasi: Pengurangan konflik terjadi ketika kondisi kontak positif (Teori Kontak Allport) tercipta, seperti adanya tujuan bersama yang lebih besar (superordinate goal) yang memaksa kerja sama. Peran aktor perdamaian dari dalam tradisi agama (memanfaatkan sumber daya internal agama untuk

rekonsiliasi) dan intervensi kelembagaan netral yang adil (negara, lembaga HAM) juga krusial. De-eskalasi membutuhkan rekonstruksi makna simbolik (Interaksionalisme Simbolik) yang mempromosikan inklusivitas dan reformasi struktur (Teori Konflik) yang mengatasi ketimpangan penyebab instrumentaliasasi.

C. Dampak Konflik Sosial Berbasis Agama

Menurut Mustafa & Khan (2023) dampak konflik ini bersifat multidimensi dan bertahan lama, melampaui korban fisik langsung.

- 1) Dampak Sosial: Konflik merusak jaring sosial (social fabric) masyarakat, menyebabkan segregasi dan disintegrasi berdasarkan identitas agama. Kepercayaan sosial (social trust) yang merupakan modal dasar bagi kohesi masyarakat hancur, digantikan oleh kecurigaan yang mendalam. Migrasi paksa dan homogenisasi wilayah memperparah kehilangan keberagaman.
- 2) Dampak Psikologis: Masyarakat mengalami trauma kolektif yang diturunkan antargenerasi. Individu hidup dalam ketakutan dan kecemasan kronis. Identitas keagamaan yang seharusnya menjadi sumber makna bisa berubah menjadi beban dan sumber stres identitas akibat stigma dan konflik.
- 3) Dampak Politik: Konflik menguatkan kecenderungan otoritarianisme, di mana negara atau kelompok mayoritas menggunakan dalih "ketertiban" untuk membatasi hak-hak minoritas. Politik menjadi semakin identitarian dan jauh dari substansi perbaikan publik. Stabilitas nasional dan citra negara di mata internasional juga terancam.
- 4) Dampak Ekonomi: Terjadi kerusakan infrastruktur, hilangnya investasi, dan terganggunya aktivitas ekonomi di daerah konflik. Kemiskinan sering kali memburuk, yang pada gilirannya dapat kembali menjadi bahan bakar bagi konflik di masa depan (lingkaran setan konflik-kemiskinan).

D. Solusi dan Penanganan Konflik

Menurut Faith as a catalyst for peace "*the islamic perspective on conflict resolution*". (2023). Penanganan konflik berbasis agama memerlukan pendekatan multi-level dan multi-pihak yang menyentuh akar kausalitasnya.

1. Tingkat Negara dan Kelembagaan

- 1) Konsistensi Penegakan Hukum: Negara harus bertindak sebagai penjaga netral (impartial guarantor) yang secara tegas dan adil menindak semua pelaku kekerasan, tanpa memandang identitas agamanya. Ini memutus impunitas dan rasa ketidakadilan.
- 2) Kebijakan Inklusif: Membangun kerangka hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak semua kelompok, termasuk minoritas agama. Menerapkan prinsip demokrasi konsosiasi (seperti otonomi kultural tertentu) di daerah dengan polarisasi tinggi dapat dipertimbangkan.
- 3) Reformasi Pendidikan: Mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan multikultural dan pendidikan agama yang inklusif dan kritis ke dalam kurikulum nasional untuk membangun empati dan dekonstruksi prasangka sejak dini.

2. Tingkat Masyarakat Sipil dan Antar-Kelompok

- 1) Dialog dan Kontak Terstruktur: Membangun forum-forum dialog yang memenuhi prasyarat Teori Kontak Allport (kesetaraan, tujuan bersama, kerja sama, dukungan otoritas). Dialog tidak hanya antar-elite agama, tetapi juga melibatkan pemuda, perempuan, dan komunitas akar rumput.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Bersama: Menciptakan kemitraan ekonomi lintas kelompok yang menciptakan saling ketergantungan dan kepentingan bersama (superordinate goal), mengurangi kompetisi atas sumber daya yang langka.
- 3) Media dan Kampanye Publik: Memanfaatkan media untuk kampanye perdamaian dan kontra narasi yang mendekonstruksi stereotip dan menyebarkan cerita-cerita tentang kerja sama lintas agama.

3. Tingkat Teologis dan Kultural

- 1) Rekonstruksi Makna Agama (Theological Reframing): Menggalakkan hermeneutika agama yang inklusif dan perdamaian dari dalam setiap tradisi. Memperkuat suara dan otoritas tokoh agama yang mengedepankan nilai-nilai universal kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang.
- 2) Penyembuhan Trauma dan Rekonsiliasi Kultural: Mengadopsi mekanisme restorative justice (keadilan restoratif) dan truth-seeking (pencarian kebenaran) untuk mengatasi luka sejarah. Proses ini membutuhkan pengakuan penderitaan semua pihak dan komitmen untuk membangun narasi bersama yang lebih inklusif tentang masa lalu.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial berbasis agama merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai sekadar benturan doktrin teologis. Konflik ini muncul dari interaksi dinamis antara faktor internal keagamaan (seperti eksklusivisme teologis dan konstruksi makna simbolik), faktor eksternal politik-ekonomi (instrumentalisasi agama untuk kekuasaan dan kompetisi sumber daya), serta faktor historis-kultural (memori kolektif dan pola relasi yang timpang). Keempat perspektif teoritis Fungsionalisme, Konflik, Interaksionalisme Simbolik, dan Identitas Sosial secara bersama-sama memberikan lensa analitis yang komprehensif untuk memahami bagaimana agama berfungsi sebagai sumber kohesi sekaligus disintegrasi, dimanfaatkan sebagai alat perebutan kekuasaan, dikonstruksi dalam interaksi sehari-hari, dan diperkuat sebagai identitas kelompok yang rentan terhadap ancaman.

Konflik tersebut memanifestasikan diri dalam spektrum yang luas, mulai dari konflik kognitif-simbolik, konflik sosial-teritorial, hingga kekerasan kolektif langsung. Dinamikanya ditandai oleh proses eskalasi yang dipicu polarisasi identitas dan instrumentalisasi politik, serta dipelihara oleh siklus balas dendam dan struktur ketimpangan. Dampaknya bersifat multidimensi dan berkepanjangan, merusak jaringan sosial, menimbulkan trauma kolektif, mendistorsi politik, dan melumpuhkan perekonomian.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, prioritas utama adalah memperkuat negara hukum dengan penegakan hukum yang konsisten dan netral, serta merancang kebijakan proaktif-inklusif yang melindungi hak-hak kelompok minoritas. Reformasi pendidikan sistemik

yang mengintegrasikan pendidikan multikultural dan kewarganegaraan inklusif ke dalam kurikulum nasional juga sangat diperlukan untuk membangun empati dan dekonstruksi prasangka sejak dini.

Bagi Masyarakat Sipil, LSM, dan Tokoh Agama, inisiatif krusial meliputi penginstitusionalan dialog terstruktur berdasarkan Teori Kontak Allport yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, penggalakan kampanye media dan kontra-narasi untuk menyebarkan cerita perdamaian, serta penguatan jaringan ekonomi lintas identitas melalui program pemberdayaan bersama. Bagi Akademisi dan Peneliti Lanjutan, diperlukan riset aksi partisipatif untuk menguji model intervensi perdamaian di lokasi spesifik, kajian mendalam tentang peran media digital dalam polarisasi dan resolusi konflik, serta eksplorasi terhadap hermeneutika perdamaian dalam berbagai tradisi agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, M. (2022). *Interreligious peacebuilding: An emerging pathway for sustainable peace*. <https://doi.org/10.4324/9781003000686-16>
- Akhtar, S., Khan, A., & Khan, G. (2022). The struggle of muslim ideologues against oppressive regimes: rethinking the conflict perspective on religion. *Pakistan Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.52567/pjsr.v4i1.986>
- Ariyanto, K. (2023). Social Conflict Among Religious Groups in the Perspective of Sociology of Religion. *Jurnal Humaya*. <https://doi.org/10.33830/humaya.v3i2.6625>
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Basedau, M., Fox, A. J., & Zellman, A. (2023). *From Deprivation, Discrimination, and Inequality to Grievances*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197693940.003.0003>
- Faith as a catalyst for peace: the islamic perspective on conflict resolution. (2023). *Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i12s.2030>
- Hoffmann, L., Köbrich, J., Stollenwerk, E., & Basedau, M. (2024). Correlates of Peace: Religious Determinants of Interreligious Peace. *Journal of Intervention and Statebuilding*. <https://doi.org/10.1080/17502977.2024.2383087>
- Huck, W. (2022). *Theorizing Religion, Social Movements, and Social Change*. <https://doi.org/10.4324/9781032011523-13>

Huda, M., Nur, Muh., Maksum, R., & Yani, J. A. (2024). Dinamika Politik Identitas Dalam Sumber Ajaran Islam di Indonesia: Studi Kasus Pemilu. *Terang*.
<https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.406>

Irwandi, I. (2025). Symbols, identity, and moderation: a sociological perspective on religious cultural branding by religious leaders. *Akselerasi*.
<https://doi.org/10.54783/jin.v7i2.1346>

Khadka, C. (2024). *Social Identity Theory and Group Behavior*.
<https://doi.org/10.3126/tutaj.v12i1.74063>

Koos, A. K., & Keulman, K. (2024). Conflicts rooted in socio-cultural animosities: a historical analysis. *Cogent Social Sciences*.

Mustafa, M. T., & Khan, M. H. U. (2023). *Promoting Religious Freedom in Diverse Societies*.
<https://doi.org/10.61506/02.00023>

Wahid, S., Barsihannor, B., & Mahmuddin, M. (2025). Breaking Up the Root of Conflict: Fundamentalism and Radicalism in Social Context. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*. <https://doi.org/10.55885/jucep.v5i1.484>